

# Olle Törnquist:



Capaian utama **[ Go Politik Buruh ]** adalah jika front meluas seperti KAJIS dapat sungguh mulai diwujudkan'

**O**lle Törnquist adalah Profesor Ilmu Politik dari Universitas Oslo, Norwegia. Ia telah mempublikasikan berbagai tulisan terkait masalah-masalah politik dan pembangunan serta demokratisasi dalam perspektif perbandingan, khususnya Indonesia, India dan Filipina. Sejak hampir sepuluh tahun terakhir – mulai dengan organisasi non-pemerintah Demos, dan sekarang dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta – ia melakukan survey demokrasi yang melibatkan ratusan responden 'aktor pro-demokrasi' Indonesia guna mengukur kapasitas 'kaum demokrat' dan aktivis masyarakat sipil di Indonesia di dalam mendorong dan mempertahankan demokrasi sekaligus mendorong pembangunan melalui

politik.

Pada beberapa kesempatan di akhir tahun 2013, Olle Törnquist diajak oleh Surya Tjandra dari Trade Union Rights Centre untuk menyaksikan secara langsung sebuah agenda besar gerakan buruh, 'buruh Go Politics' dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, khususnya di Bekasi. Berikut adalah hasil wawancara singkat dengannya beberapa waktu setelah kunjungan tersebut, sebagai bahan refleksi kita.

**TURC: Apa pendapat anda terhadap keterlibatan buruh dalam kegiatan politik (misalnya, menjadi Calon Legislatif)?**

**OT:** Penelitian menunjukkan bahwa dimungkinkan sebuah penggabungan antara demokrasi, kesejahteraan dan pembangunan ekonomi. Keterlibatan politik oleh pekerja adalah sangat penting. Oleh karena itu ini merupakan hal yang positif untuk semua karena banyak pekerja Indonesia yang menyadari bahwa mereka harus terlibat dalam politik (di samping kekhawatiran serikat pekerja lokal). Di sisi lain, ada juga kasus di mana serikat pekerja dan organisasi buruh lainnya telah terlibat dalam politik tetapi ada juga yang tidak beres, misalnya selain karena kondisi struktural yang buruk tetapi juga politik yang buruk pada bagian dari pekerja itu sendiri. Oleh karena itu harus ada analisis mengenai masalah yang ada dan pilihan dalam setiap konteks dan

periode waktu tertentu. Keterlibatan pekerja diperlukan tetapi hal itu tidak cukup politik tetapi di mana hal-hal yang tidak beres pula, sering kali karena kondisi struktural yang buruk tetapi juga karena politik yang buruk pada bagian dari tenaga kerja itu sendiri. Oleh



karena itu harus ada analisis terhadap masalah tertentu dan pilihan dalam setiap konteks dan periode waktu tertentu. Keterlibatan pekerja diperlukan tetapi tidak cukup.

Tidak ada yang salah ketika serikat mencoba untuk mendukung kandidat politik mereka sendiri atau lainnya yang mendukung reformasi untuk kepentingan orang-orang biasa. Tapi saya takut jika banyak transaksi antara berbagai pemimpin serikat pekerja dan partai-partai besar dan politisi untuk mendapatkan posisi (bukan reformasi progresif tertentu) sebagai imbalan atas suara, menghasilkan perpecahan, meningkatkan fragmentasi di dalam gerakan buruh dan melakukan sedikit untuk mendorong aliansi politik yang lebih luas dengan gerakan sosial dan kelompok aksi warga. Ini akan menghancurkan. Setiap kesepakatan harus menjadi bagian dari strategi transparan langkah politik dan reformasi untuk mengatasi tantangan utama menggabungkan demokrasi, kesejahteraan dan pembangunan di Indonesia.

**TURC: Jadi apa tantangan terbesar yang dihadapi buruh**

## dalam kegiatan politik?

**OT:** Ada dua masalah utama. Pertama adalah bahwa pembangunan ekonomi dan industrialisasi di negara seperti Indonesia amat tidak merata, tidak menyeluruh dan menghasilkan jauh lebih sedikit kelas buruh yang meluas dan bersatu daripada pada saat revolusi industri dan seterusnya (di Eropa sampai sekitar tahun 1970-an) di mana gerakan buruh (dengan serikat buruh dan partainya dan sekutu dari kalangan petani kecil dan kelas menengah) dapat menggabungkan demokrasi, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan. Saya termasuk orang yang tidak berpikir bahwa adalah bermanfaat bahwa sekelompok kecil buruh dan aktivis yang mampu melumpuhkan perekonomian menggunakan kapasitas ini untuk mendorong pemimpin tidak demokratis 'kuat' (seperti Soekarno) yang pada gilirannya diharapkan dapat menyatukan rakyat dan memperbaiki semuanya dari atas. Sebaliknya saya termasuk orang yang berpikir sejarah menunjukkan ada kebutuhan khusus untuk aliansi luas di antara berbagai bagian kaum buruh, dari buruh industri terampil dan buruh kontrak terkait hingga pekerja rumah tangga, wiraswasta di kota-kota dan buruh harian lepas di daerah pedesaan, yang juga dapat juga berhubungan dengan bagian progresif petani kecil, nelayan dan kelas menengah, ditambah pengusaha yang berorientasi produksi. Tapi ini tentu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sejauh ini terbukti cukup sulit diwujudkan di Indonesia, bahkan setelah reformasi tahun 1998.

Masalah utama kedua adalah bahwa aksi progresif terpadu telah menjadi jauh lebih sulit terlepas dari terjadinya perkembangan cepat pembangunan kapitalis dan industrialisasi. Hal ini karena neo-liberalisme global menghasilkan dua blok rintangan. Rintangan pertama adalah meningkatnya kesenjangan karena fakta bahwa kebanyakan modal dikumpulkan dengan menyingkirkan orang-orang dari kehidupan mereka dan karena produksi didasarkan pada konsumsi mereka yang relative sudah cukup baik kondisinya daripada juga kebutuhan mayoritas penduduk. Rintangan kedua adalah perkembangan pesat dari praktek kerja outsourcing dan hubungan kerja informal di mana makin banyak buruh bahkan tidak punya majikan untuk bersatu melawan dan bernegosiasi. Singkatnya, tantangan utama adalah untuk menemukan cara-cara membangun persatuan dan aliansi yang meluas di balik strategi untuk kemajuan bertahap daripada perbaikan yang cepat dan tidak demokratis dari atas.

**TURC: Strategi apa yang diperlukan untuk pekerja dalam kegiatan politik?**

**OT:** Kabar baiknya adalah bahwa aliansi meluas selama kampanye Komite Akasi Jaminan Sosial (KAJS) telah menunjukkan apa yang mungkin terjadi! Jika aliansi seperti ini dapat dikembangkan lebih lanjut dan berkelanjutan, peta jalannya sudah cukup jelas. Cara untuk kemajuan adalah tidak dengan bertindak melalui partai-partai dan politisi arus utama. Itu hanya akan berarti mendorong politik transaksional alternatif. Sebaliknya, hasil dari penelitian saya menunjukkan bahwa jalan ke depan adalah dengan membangun gerakan berbasis persatuan meluas untuk isu-isu dan kepentingan yang telah disingkirkan dalam demokrasi yang elitis Indonesia – seperti keterwakilan yang lebih asli, gerakan anti-korupsi yang kuat dan, tentu saja, kesejahteraan rakyat yang dikombinasikan dengan pertumbuhan yang berkelanjutan. Ini kemudian bisa menjadi dasar yang kuat untuk sebuah partai aksi buruh dan warga yang lebih meluas.

Faktor historis unik yang membuat aksi meluas seperti itu mungkin adalah bahwa tantangan neo-liberal terkait peminggiran rakyat dan informalisasi hubungan kerja juga telah memunculkan gerakan perlawanan (counter-movement). Gerakan ini, seperti demikian terjadi, menjadi pengganti kenyataan bahwa Indonesia tidak akan pernah mendapatkan kondisi yang sama untuk politik buruh yang berkembang ketika revolusi industri terjadi [di Eropa]. Sampai batas tertentu, gerakan perlawanan yang saya pikirkan mengingatkan pada gerakan serikat buruh untuk perubahan sosial (social-movement-trade-unionism) yang ada di balik kebangkitan Partai Buruh di Brazil. Lebih khusus lagi, beberapa serikat buruh terorganisir di sektor industri modern di Indonesia (khususnya FSPMI), telah nyata-nyata menyadari bahwa mereka kehilangan anggota dan daya tawar mereka karena praktek outsourcing, dan bahwa mereka tidak dapat menegosiasikan kesepakatan yang baik bagi anggotanya melulu pada tingkat pabrik saja; dalam banyak kasus majikan bahkan sama sekali tidak mau bernegosiasi. Dalam kepentingan mereka sendiri, para buruh dan para pemimpin mereka yang tercerahkan ini, merasa perlu beralih ke pemerintah daerah dan ke negara untuk menuntut undang-undang perburuhan dan skema kesejahteraan yang lebih adil, juga lebih banyak pekerjaan dan kebijakan ekonomi yang lebih baik. Dan untuk membuat perubahan sesungguhnya, mereka perlu membangun aliansi-aliansi seluas mungkin dengan sebanyak mungkin buruh, gerakan sosial, dan kelompok-kelompok aksi warga lainnya; ditambah beberapa politisi yang benar-benar mendukung upaya tersebut dan tidak hanya ingin mendapatkan suara untuk manfaat jangka pendek mereka.

(Armita)